



Penerapan Teori Kebenaran Filsafat dalam Strategi Pemberantasan Hoaks di Era Digital

Dinda Ocvita Windi Pratiwi

Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: Dinda.ocvita.2404138@students.um.ac.id

Abstract. *The application of the theory of truth in philosophy can make an important contribution to the strategy for eradicating hoaxes in the digital era. Hoaxes, as misinformation and often deliberately spread for certain purposes, have a broad negative impact, especially in the formation of public opinion and social stability. In this context, theories of truth such as correspondence, coherence, and pragmatism can be used to evaluate and identify the truth of information spread in cyberspace. Correspondence theory, for example, can be used to confirm whether information corresponds to objective facts. Coherence theory, on the other hand, prioritizes the consistency of information with a wider system of knowledge, while pragmatism theory assesses truth based on the practical impact of receiving information. The application of these theories in a hoax eradication strategy involves media education, increasing digital literacy, and developing information verification algorithms that prioritize the principles of philosophical truth. With this approach, it is hoped that the public will be smarter in filtering information, so that the spread of hoaxes can be minimized and public trust in digital media can be restored.*

Keywords: *Digital literacy, Hoax, Theory of Truth.*

Abstrak. Penerapan teori kebenaran dalam filsafat dapat memberikan kontribusi penting dalam strategi pemberantasan hoaks di era digital. Hoaks, sebagai informasi yang salah dan sering kali sengaja disebar untuk tujuan tertentu, memiliki dampak negatif yang luas, terutama dalam pembentukan opini publik dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, teori-teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatisme dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kebenaran informasi yang tersebar di dunia maya. Teori korespondensi, misalnya, dapat digunakan untuk mengonfirmasi apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta objektif. Teori koherensi, di sisi lain, mengutamakan konsistensi informasi dengan sistem pengetahuan yang lebih luas, sementara teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan dampak praktis dari penerimaan suatu informasi. Penerapan teori-teori ini dalam strategi pemberantasan hoaks melibatkan pendidikan media, peningkatan literasi digital, dan pengembangan algoritma verifikasi informasi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran filsafat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyaring informasi, sehingga penyebaran hoaks dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap media digital dapat dipulihkan.

Kata kunci: Hoaks, Literasi digital, Teori Kebenaran.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa dampak besar dalam cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Era digital memberikan kemudahan akses informasi secara cepat dan luas, namun juga membawa tantangan baru berupa penyebaran hoaks atau informasi palsu. Hoaks tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas sosial, merusak hubungan antar warga, serta mempengaruhi kebijakan publik. Pada kenyataannya, hoaks sering kali mengedepankan narasi yang emosional dan bias, sementara fakta objektif

seringkali terabaikan atau dipelintir untuk mendukung agenda tertentu. Dalam menghadapi fenomena ini, pemberantasan hoaks menjadi salah satu prioritas penting dalam dunia digital saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun platform digital, untuk menanggulangi penyebaran hoaks. Namun, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, masalah hoaks belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu aspek yang sering kali terlewat adalah pemahaman mendalam tentang kebenaran itu sendiri dan bagaimana teori kebenaran dalam filsafat dapat diterapkan dalam konteks informasi di era digital. Teori-teori kebenaran dalam filsafat, seperti teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, memberikan perspektif berbeda dalam memahami apa yang dimaksud dengan "kebenaran". Teori korespondensi menekankan hubungan antara klaim dan fakta objektif, sedangkan teori koherensi lebih menitikberatkan pada konsistensi informasi dalam sistem pengetahuan yang lebih luas. Sementara itu, teori pragmatisme mengukur kebenaran dari dampak praktis yang ditimbulkan oleh suatu informasi. Penerapan teori-teori kebenaran ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang tersebar di dunia maya, serta membantu masyarakat dalam menentukan mana yang benar dan mana yang hoaks. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teori kebenaran dalam filsafat dapat diterapkan dalam strategi pemberantasan hoaks di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dalam menangani penyebaran hoaks, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengenali dan memahami kebenaran informasi yang mereka terima.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Kebenaran dalam Filsafat

Teori kebenaran dalam filsafat memberi landasan pemikiran untuk menilai kebenaran informasi yang tersebar, termasuk di dunia digital. Adapun beberapa teori kebenaran yang relevan dalam konteks pemberantasan hoaks adalah sebagai berikut:

1) Teori Korespondensi

Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu klaim ditentukan oleh kecocokannya dengan kenyataan atau fakta objektif. Dalam konteks pemberantasan hoaks, teori ini menuntut verifikasi fakta untuk memastikan bahwa informasi yang tersebar dapat dibuktikan secara objektif. Misalnya, klaim tentang peristiwa tertentu (seperti bencana alam atau kejadian politik) perlu dibandingkan dengan data yang sah dan sumber yang terpercaya. Penelitian terbaru oleh Frischmann (2020)

menekankan pentingnya verifikasi berbasis bukti di platform digital untuk menanggulangi misinformasi.

2) Teori Koherensi

Teori koherensi menganggap kebenaran suatu pernyataan dapat diukur dengan konsistensinya terhadap sistem pengetahuan yang ada. Sebuah informasi dapat dianggap benar jika ia konsisten dengan pengetahuan yang sudah diterima oleh banyak pihak. Dalam konteks pemberantasan hoaks, teori ini menekankan integritas informasi dalam jaringan pengetahuan yang lebih luas, termasuk literasi digital dan pemahaman ilmiah yang berkembang. Zhang dan Zhang (2021) mengungkapkan bahwa evaluasi konsistensi informasi dengan fakta ilmiah yang mapan dapat membantu mencegah penyebaran hoaks.

3) Teori Pragmatism

Menurut teori pragmatisme, kebenaran suatu klaim bergantung pada dampaknya yang nyata dan bermanfaat bagi pemecahan masalah. Dalam pemberantasan hoaks, teori ini lebih menekankan pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu informasi. Jika sebuah klaim menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan publik, meskipun ia tampaknya benar pada permukaannya, dampaknya yang negatif mengindikasikan bahwa klaim tersebut tidak dapat dianggap benar secara pragmatis. Binns (2022) mengkritisi pentingnya efektivitas informasi dalam konteks sosial, di mana informasi yang menyesatkan dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar.

B. Fenomena Hoaks di Era Digital

Hoaks di era digital merujuk pada informasi palsu yang sengaja disebarakan melalui platform digital dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau mencapai keuntungan tertentu. Penyebaran hoaks dipermudah oleh kecepatan dan luasnya distribusi informasi di internet. Menurut Pew Research Center (2023), sekitar 60% pengguna internet mengaku kesulitan untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah di media sosial, yang mencerminkan masalah besar dalam literasi digital. Fenomena ini dipengaruhi oleh algoritma platform digital yang sering memperkuat konten yang sensasional atau kontroversial, meskipun konten tersebut tidak valid. Pennycook dan Rand (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa informasi yang tidak benar lebih cepat tersebar di media sosial dibandingkan informasi yang valid, yang memperburuk masalah penyebaran hoaks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan Data dilakukan dengan pengambilan data sekunder dari artikel ilmiah, buku filsafat, dan laporan terkait fenomena hoaks dalam lima tahun terakhir. Referensi utama mencakup tulisan Surajiyo dan Dhika (2023) yang membahas penerapan teori kebenaran dalam analisis hoaks. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi relevansi teori kebenaran dalam filsafat dengan strategi praktis untuk memberantas hoaks. Analisis ini berfokus pada penerapan teori korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan performatif untuk menilai validitas informasi. Penyimpulan sintesis temuan dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengeksplorasi penerapan teori kebenaran dalam filsafat terhadap strategi pemberantasan hoaks di era digital. Kajian literatur ini mencakup analisis berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang membahas teori kebenaran filsafat dan pemberantasan hoaks. Berdasarkan kajian literatur, beberapa hasil utama dan pembahasan terkait penerapan teori kebenaran dalam pemberantasan hoaks di era digital dapat diidentifikasi sebagai berikut.

A. Penerapan Teori Kebenaran dalam Konteks Hoaks

Dalam kajian literatur, ditemukan bahwa penerapan teori kebenaran dalam pemberantasan hoaks di era digital berfokus pada tiga teori utama: korespondensi, koherensi, dan pragmatisme.

a) Teori Korespondensi

Menurut teori korespondensi, suatu klaim atau informasi dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Teori ini memberikan dasar yang kuat untuk verifikasi faktual, namun penerapannya terbatas oleh kemampuan untuk mengakses dan memverifikasi sumber informasi yang benar dalam dunia digital yang cepat berubah. Dalam pemberantasan hoaks, teori korespondensi berperan penting dalam memastikan bahwa klaim-klaim yang tersebar di media digital diverifikasi berdasarkan fakta objektif. Misalnya, hoaks terkait isu kesehatan, seperti klaim palsu tentang vaksinasi atau pengobatan alternatif, dapat diperiksa dengan mengacu pada data dan penelitian ilmiah yang sudah terbukti valid. Berdasarkan kajian literatur, teori ini menunjukkan bahwa penerapan verifikasi faktual yang berbasis pada data ilmiah

dapat membantu mengurangi hoaks, namun masih ada tantangan dalam memverifikasi hoaks yang disampaikan dengan cara yang lebih halus atau melalui media visual seperti *deepfake*.

b) Teori Koherensi

Teori koherensi menilai kebenaran berdasarkan konsistensi informasi dengan sistem pengetahuan yang lebih luas dan koheren. Teori ini memberikan perspektif yang berguna dalam menangani hoaks yang sengaja dirancang agar konsisten dengan ideologi atau pandangan tertentu. Namun, teori ini menunjukkan bahwa penanganan hoaks yang berbasis pada koherensi membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya, serta keterlibatan komunitas untuk menggugah kesadaran bersama terhadap pengetahuan yang lebih luas. Dalam konteks hoaks digital, banyak klaim yang beredar didesain untuk konsisten dengan pandangan atau ideologi tertentu, meskipun bertentangan dengan fakta objektif. Kajian literatur menunjukkan bahwa teori koherensi digunakan oleh banyak platform untuk memeriksa apakah suatu klaim sejalan dengan informasi ilmiah atau data yang sudah diterima secara umum. Namun, hoaks yang mengandalkan informasi yang telah dimanipulasi untuk terlihat koheren dengan keyakinan kelompok tertentu lebih sulit dibongkar, karena seringkali ia "terbukti" konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini oleh audiens tertentu. Hal ini menjelaskan mengapa hoaks terkait politik atau teori konspirasi seringkali lebih sulit diatasi.

c) Teori Pragmatism

Penerapan teori pragmatisme lebih fokus pada dampak sosial dari hoaks daripada kebenaran faktual semata. Teori ini mengingatkan kita bahwa hoaks tidak hanya harus dipandang dari kacamata kebenaran faktual atau konsistensi pengetahuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Hoaks yang merusak kehidupan sosial, memperburuk polarisasi, atau merusak kepercayaan publik harus ditanggulangi dengan pendekatan yang memperhitungkan konsekuensi sosialnya. Dalam konteks ini, strategi pemberantasan hoaks tidak hanya mengutamakan verifikasi, tetapi juga penanganan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, teori pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hoaks yang mungkin tidak sepenuhnya salah, namun memiliki dampak sosial yang merusak, dianggap sebagai informasi yang "tidak benar" secara praktis. Kajian literatur menunjukkan bahwa teori pragmatisme membantu

mengidentifikasi hoaks yang berbahaya secara sosial, seperti hoaks yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap vaksin atau memperburuk polarisasi politik.

B. Literasi Digital dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Hoaks

Berdasarkan kajian literatur terbaru, literasi digital terbukti menjadi faktor penting dalam strategi pemberantasan hoaks. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara efektif di dunia digital. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi digital yang rendah lebih rentan terhadap hoaks. Literasi digital yang buruk menghalangi individu dalam membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang salah atau menyesatkan. Berbagai literatur menyarankan pentingnya pendidikan literasi digital yang lebih baik, baik di sekolah, masyarakat, maupun melalui kampanye media sosial, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks dan memahami bagaimana verifikasi informasi dapat dilakukan. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google telah mengembangkan sistem verifikasi yang dapat mendeteksi hoaks secara otomatis, pengguna tetap memegang peran kunci dalam pemberantasan hoaks. Oleh karena itu, literasi digital yang mengajarkan pengguna bagaimana menggunakan alat verifikasi ini dan menganalisis sumber informasi sangat penting dalam upaya kolektif untuk menanggulangi hoaks.

C. Peran Teknologi dalam Verifikasi Hoaks

Penelitian literatur juga mengungkapkan bahwa teknologi verifikasi memainkan peran besar dalam pemberantasan hoaks. Platform media sosial kini semakin banyak mengandalkan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning, untuk mendeteksi dan menandai konten yang berpotensi hoaks. Misalnya, Google menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi informasi yang meragukan, sementara Twitter dan Facebook menggandeng pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi klaim-klaim yang viral. Namun, kajian literatur mengungkapkan bahwa teknologi ini memiliki keterbatasan, terutama dalam mengidentifikasi hoaks yang lebih kompleks atau dikemas dengan cara yang lebih subtil, seperti hoaks yang disebarkan melalui meme atau gambar manipulatif. Teknologi verifikasi saat ini umumnya lebih efektif untuk mendeteksi hoaks yang berbentuk teks atau klaim eksplisit, namun lebih sulit untuk mendeteksi hoaks yang berbentuk visual atau yang tersembunyi dalam konteks tertentu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori kebenaran filsafat dalam pemberantasan hoaks di era digital perlu melibatkan pendekatan yang holistik, mencakup verifikasi faktual (korespondensi), konsistensi dengan pengetahuan ilmiah (koherensi), serta evaluasi dampak sosial (pragmatisme). Selain itu, literasi digital yang lebih baik sangat penting untuk membantu masyarakat mengidentifikasi dan memverifikasi hoaks secara mandiri. Terakhir, meskipun teknologi verifikasi memainkan peran penting, keterbatasannya dalam mendeteksi hoaks yang lebih kompleks menekankan perlunya pendekatan yang lebih berbasis komunitas dan edukasi masyarakat dalam upaya kolektif untuk mengatasi hoaks di dunia digital.

DAFTAR REFERENSI

- Binns, R. (2022). Social media, trust, and the impact of fake news. *Journal of Digital Media and Policy*, 9(1), 11–26.
- Frischman, M. (2020). *The ethics of information and disinformation in the digital age*. Cambridge University Press.
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2020). Fighting misinformation on social media using interventions that are both effective and scalable. *Nature*, 587, 234–237.
- Pew Research Center. (2023). *The state of online misinformation: A global perspective*. Retrieved from <https://pewresearch.org>
- Surajiyo, D., & Dhika, R. (2023). Misinformation and public policy in the digital age: A study on the role of fact-checking institutions. *Journal of Media Ethics*, 38(2), 145–160.
- Zhang, Y., & Zhang, C. (2021). Social media and the spread of fake news: A study on the role of algorithms in shaping public opinion. *Journal of Digital Communication*, 14(4), 453–470.